

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Batu

a. Sejarah Kota Batu

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Sejak abad ke-10, wilayah Kota Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan, karena wilayahnya adalah daerah pegunungan dengan kesejukan udara yang nyaman, juga didukung oleh keindahan pemandangan alam sebagai ciri khas daerah pegunungan. Pada masa lampau yaitu pemerintahan Raja Sendok, seorang petinggi kerajaan bernama Mpu Supo diperintah Raja Sendok untuk membangun tempat peristirahatan keluarga kerajaan di pegunungan yang di dekatnya terdapat mata air. Dengan upaya yang keras, akhirnya Mpu Supo menemukan suatu kawasan yang sekarang lebih dikenal sebagai kawasan Wisata Songgoriti.

Wilayah Kota Batu yang terletak di dataran tinggi di kaki Gunung Panderman dengan ketinggian 700 sampai 1100 meter di atas permukaan laut, berdasarkan kisah-kisah orang tua maupun dokumen yang ada maupun yang dilacak keberadaannya, sampai saat ini belum diketahui kepastiannya tentang kapan nama "BATU" mulai disebut untuk menamai kawasan peristirahatan

tersebut. Dari beberapa pemuka masyarakat setempat memang pernah mengisahkan bahwa sebutan Batu berasal dari nama seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Abu Ghonaim atau disebut sebagai Kyai Gubug Angin yang selanjutnya masyarakat setempat akrab menyebutnya dengan panggilan Mbah Wastu. Dari kebiasaan kultur jawa yang sering memperpendek dan mempersingkat mengenai sebutan nama seseorang yang dirasa terlalu panjang, juga agar lebih singkat penyebutannya serta lebih cepat bila memanggil seseorang, akhirnya lambat laun sebutan Mbah Wastu dipanggil Mbah Tu menjadi Mbatu atau Batu sebagai sebutan yang digunakan untuk kota dingin ini di Jawa Timur.

Panorama alam yang indah dan berudara sejuk, tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat lain juga wisatawan domestik dan mancanegara untuk mengunjungi dan menikmati Kota Batu sebagai kawasan pegunungan yang mempunyai daya tarik tersendiri. Untuk itulah di awal abad 19 Kota Batu berkembang menjadi daerah tujuan wisata, khususnya orang-orang belanda, sehingga orang-orang belanda itupun membangun tempat-tempat peristirahatan (villa) bahkan ada yang akhirnya bermukim di Kota Batu. Situs dan bangunan-bangunan peninggalan dari orang belanda atau semasa pemerintahan hindia belanda itupun masih berbekas bahkan menjadi aset dan kunjungan wisata hingga saat ini. Begitu kagumnya bangsa belanda atas keindahan dan keelokan Kota Batu, sehingga bangsa belanda mensejajarkan wilayah Kota Batu dengan

sebuah negara di eropa yaitu Switzerland dan memberikan predikat sebagai “*De Klein Switzerland*” atau Swiss kecil di Pulau Jawa. Peninggalan arsitektur dengan nuansa dan corak eropa pada penjajahan belanda dalam bentuk sebuah bangunan yang ada saat ini serta panorama alam yang indah di kawasan Kota Batu sempat membuat Bapak Proklamator sebagai *The Father Foundation of Indonesia* yaitu Bung Karno dan Bung Hatta setelah perang kemerdekaan untuk mengunjungi dan beristirahat di kawasan Selecta, Kota Batu. (sumber <http://website.batukota.go.id>)

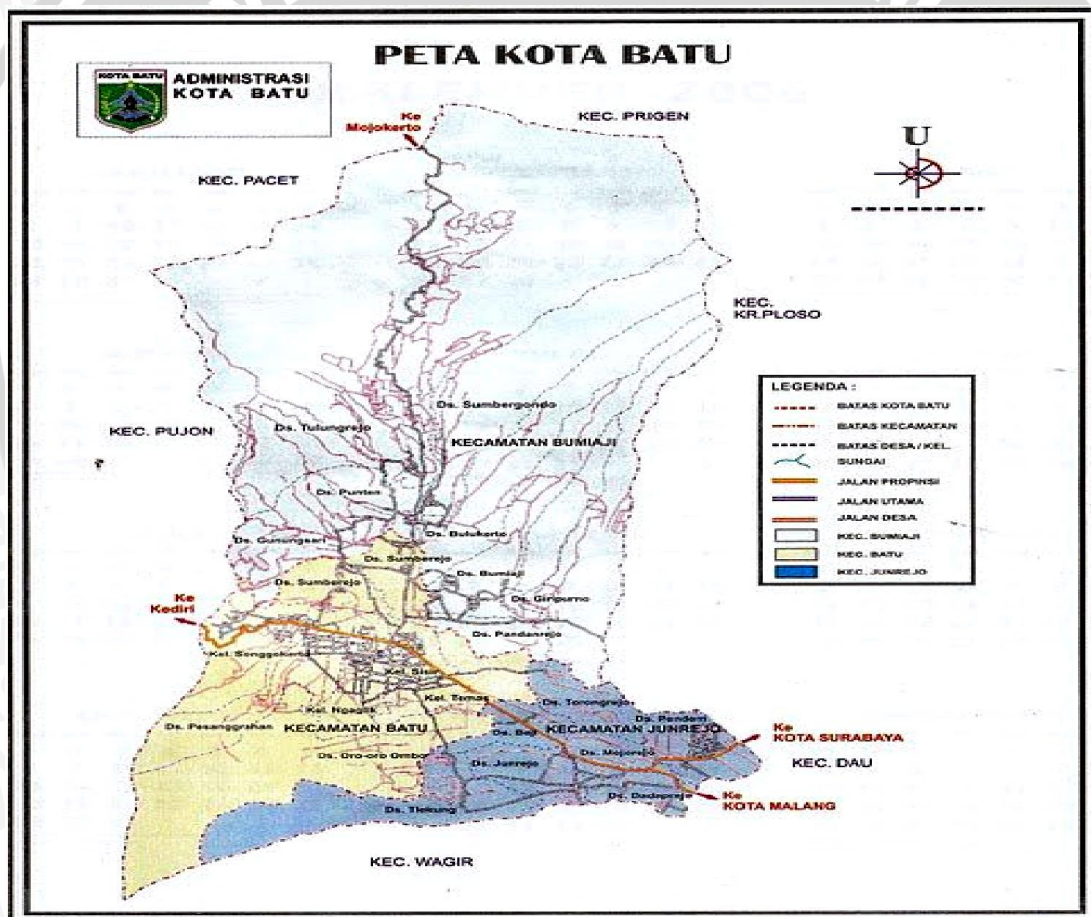
Kota Batu merupakan daerah otonom baru di Provinsi Jawa Timur yang terbentuk pada tahun 2004. Kota Batu sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Malang yaitu pada Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 atau disebut dengan SSWP 1 Malang Utara. Pada tahun 2010 Kota Batu terbagi menjadi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, Kecamatan Bumiaji dan terdiri dari 24 desa/kelurahan, 231 RW dan 1.092 RT (Sumber : *Batu Dalam Angka 2011*).

b. Geografis

Kota Batu dalam kondisi geografisnya dapat dibagi menjadi dua bagian utama yaitu daerah lereng atau bukit dengan proporsi bagian lebih luas dan daerah daratan. Luas secara keseluruhan kawasan Kota Batu adalah sekitar 19.908,72 ha atau 0,42 persen dari total luas Jawa Timur. Jika dilihat dari segi

astronomi, Kota Batu terletak pada posisi 122°17'- 122°57' Bujur Timur dan 7°44'8'26' Lintang Selatan. Batas-batas wilayah Kota Batu sebagai berikut :

- 1) Batas Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan
- 2) Batas Selatan : Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang
- 3) Batas Barat : Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang
- 4) Batas Timur : Kecamatan Karangploso dan Kec. Dau, Kabupaten Malang



Gambar 2 : Peta Wilayah Kota Batu. (Sumber : <https://id.wikipedia.org>.)

Kota batu dilihat secara geologis tersusun atas endapan gunung api yang aktif pada masa lampau. Endapan tersebut biasanya disebut dengan endapan epiklastik dan endapan tiroklastik. Dengan struktur geologis tersebut, Kota Batu menjadi memiliki empat jenis tanah yang berupa lahan yang paling subur dengan luas 6.231,12 Ha. Dari 6.231,12 Ha terbagi menjadi lahan tanah yang memiliki kesuburan seluas 3.026,37 Ha dan sisanya merupakan lahan tanah yang kurang subur dan memiliki kandungan kapur, dan jenis tanah latosol. Informasi geologis tersebut menggambarkan bahwa Kota Batu memiliki wilayah yang kandungan tanahnya sangat subur dan cocok untuk pertanian. Karena jenis tanahnya terbentuk dari endapan gunung-gunung yang mengelilingi Kota Batu. Sehingga sebagian mata pencarian dari penduduk Kota Batu sebagian besar didominasi dari sektor pertanian.

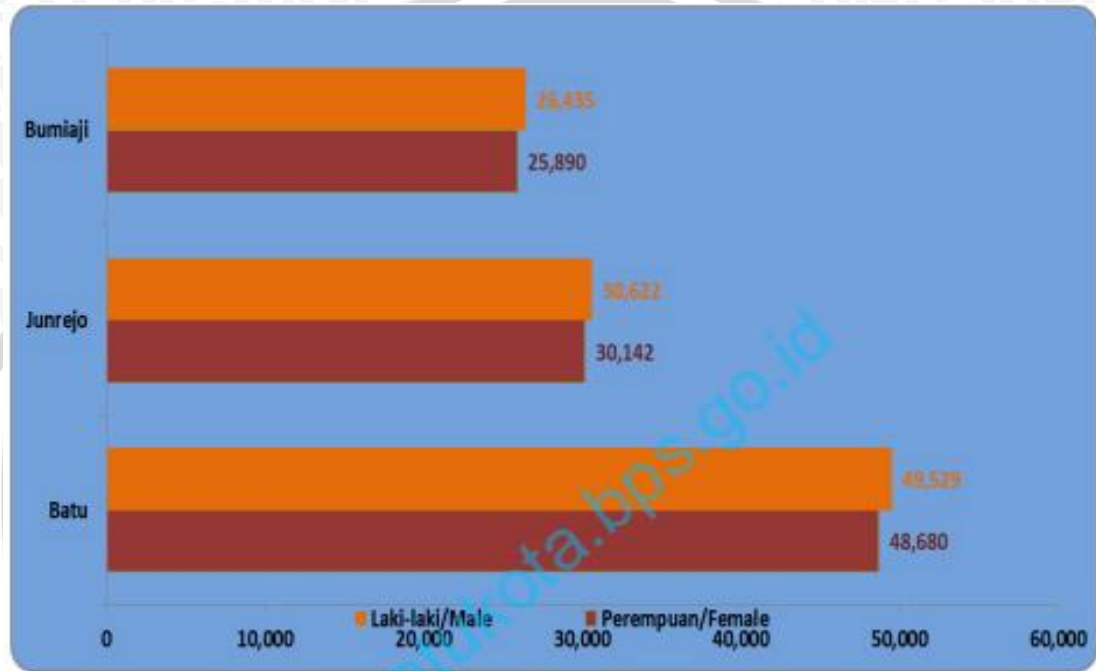
Kota batu merupakan salah satu daerah pegunungan yang berhawa dingin dengan suhu udara mencapai $21,3^{\circ}\text{C}$ dan 34°C . Wilayah Kota Batu secara umum adalah daerah perbukitan dan pegunungan. Diantaranya terdapat gunung-gunung di Kota Batu yang sudah diakui secara nasional. Terdapat tiga gunung, yaitu Gunung Panderman yang mempunyai ketinggian (2.010 meter), Gunung Welirang (2.156 meter), dan Gunung Arjuno (3.399 meter). Kemudian kemiringan wilayah di Kota Batu mempunyai kemiringan lahan sebesar 25-40% dan kemiringan >40 .

Kota Batu adalah salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki pemandangan alam yang sangat indah, sehingga banyak sekali dijumpai tempat-tempat wisata yang mengandalkan keindahan panorama alamnya. Ketersediaan sumber mata air di Kota Batu banyak dipengaruhi oleh sungai-sungai yang mengalir di bagian pusat kota, menyebabkan juga berpengaruh sekali terhadap perkembangan kota. Ketersediaan sumber-sumber mata air cukup potensial, dimana mata air tersebut di konsumsi oleh penduduk Kota Batu itu sendiri dan sekitarnya. Kota Batu sampai saat ini telah di inventarisasi sebanyak 83 sumber mata air yang masih produktif dan selama ini digunakan oleh beberapa PDAM daerah terdekat untuk mengairi wilayahnya yaitu PDAM unit Kota Batu, PDAM Kabupaten Malang, PDAM Kota Malang juga digunakan oleh pihak swasta dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan

c. Penduduk

Data kependudukan diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi untuk memutuskan suatu kebijakan untuk masyarakat karena penduduk merupakan subyek dan sekaligus sebagai obyek dalam proses keputusan suatu kebijakan publik atau pelayanan publik. Data penduduk dapat diperoleh melalui beberapa cara yaitu melalui sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei kependudukan.

Gambar Grafik Penduduk Akhir Tahun dirinci menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Batu pada tahun 2014.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu

(<http://batukota.bps.go.id/index.php/publikasi>)

Penduduk Kota Batu tersebar dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. Prosentase penduduk Kota Batu yang bertempat tinggal di Kecamatan Batu (46,48%), sementara separuhnya lagi bertempat tinggal di Bumiaji (28,76%) dan Junrejo (24,76%). Dari sisi luas wilayah sebenarnya Kecamatan Bumiaji adalah kecamatan yang memiliki luas terbesar dibandingkan dua kecamatan lainnya. Hal ini dipahami karena secara geografis Kecamatan Batu memiliki wilayah yang relatif lebih datar dari dua kecamatan yang lain. Sementara itu, Kecamatan Bumiaji

meskipun memiliki luas wilayah paling besar tetapi kondisi geografis wilayah kecamatan ini merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar digunakan untuk wilayah pertanian dan konservasi lingkungan.

Kepadatan penduduk berkaitan dengan daya dukung (*carrying capacity*) suatu wilayah. Indikator yang umum dipakai adalah Rasio Kepadatan Penduduk (*density ratio*) yaitu rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk dari per kilometer persegi pada tahun tertentu. Sehingga, jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya maka Kecamatan Batu menjadi kecamatan terpadat di Kota Batu, diikuti Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. Sebenarnya kepadatan Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo hampir sama. Hal ini terjelaskan dari jumlah penduduk yang tinggal di Kecamatan Junrejo hanya separuh dari jumlah penduduk di Kecamatan Batu tetapi luas wilayahnya juga separuh dari luas wilayah Kecamatan Batu

Indikator komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di suatu wilayah atau umum dikenal dengan *Sex-Ratio* atau Rasio Jenis Kelamin. Indikator ini juga sering digunakan untuk menyatakan banyaknya penduduk pria per 100 wanita. Indikator ini dihitung sebagai persentase rasio jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Di Kota Batu di tiga kecamatan diatas 100 persen semua. Artinya penduduk laki-laki di Kota Batu masih lebih banyak daripada penduduk perempuan. Kota Batu terbuka bagi siapa saja baik WNI

maupun WNA. Menurut Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Batu di tahun 2014 tercatat 27 penduduk Kota Batu adalah WNA atau sekitar 0.012 persen dari total penduduk yang tercatat di Dispendukcapil Kota Batu. Penduduk WNA di Kota Batu terdiri dari 25 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Keberadaan WNA ini tersebar di tiga kecamatan, Kecamatan Batu rupanya dipilih sebagian besar WNA untuk memilih tempat tinggal yaitu 18 orang yang terdiri dari 17 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Sisanya memilih untuk tinggal di Kecamatan Junrejo 1 orang laki-laki dan di Kecamatan Bumiaji 7 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. (*Sumber: Batu Dalam angka 2015*).

d. Visi dan Misi Kota Batu

1) Visi Kota Batu

Tahun 2012-2017

**KOTA BATU SENTRA PERTANIAN ORGANIK BERBASIS
KEPARIWASATAAN INTERNASIONAL**

Ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing ditopang sumber daya yaitu alam, manusia dan budaya yang tangguh diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, di jiwai oleh keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa.

2) Misi Kota Batu

Tahun 2012-2017

- a. Peningkatan Kualitas Hidup Antar Umat Beragama
- b. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
- c. Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian Organik
- d. Meningkatkan Posisi Peran Dari Kota Sentra Pariwisata Menjadi Kota Kepariwisataan Internasional
- e. Optimalisasi Pemerintahan Daerah
- f. Peningkatan Kualitas Pendidik Dan Lembaga Pendidikan
- g. Peningkatan Kualitas Kesehatan
- h. Pengembangan Infrastruktur (Sektor Fisik) Khususnya Perkantoran Pemerintah, Fasilitas Publik, Prasarana Dan Sarana Lalu Lintas
- i. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Guna Peningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
- j. Menciptakan Stabilitas Dan Kehidupan Politik Di Kota Batu Yang Harmonis Dan Demokratis
- k. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi Dan UKM.

2. Gambaran Umum Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu

a. Visi dan Misi

1) Visi

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Selain itu, Visi SKPD merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan yang diinginkan oleh suatu Perangkat Daerah agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang bisa menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi juga suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Jadi, pada hakekatnya membentuk visi organisasi adalah menciptakan gambaran bersama mengenai masa depan yang harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategik merupakan langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai atau awal berkarya, tetapi juga penting pada perjalanan kehidupan organisasi selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi

oleh perubahan lingkungan eksternal dan internal, oleh karena itu visi organisasi juga harus menyesuaikan dengan kondisi perubahan tersebut.

Dinas Sosial dan tenaga kerja Kota Batu harus dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintahan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara kelembagaan diharapkan akan mampu tercapai kesejahteraan sosial masyarakat yaitu terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sehingga gambaran atau keadaan yang diinginkan adalah Masyarakat Kota Batu yang Makmur, yaitu jika seluruh masyarakat Kota Batu dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak dan bermartabat sesuai dengan strata sosial masing-masing.

Sebagai bagian dari visi Kota Batu yaitu, Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisata Internasional maka, visi dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu sebagai terjemahan visi-misi dan agenda pembangunan Kota Batu adalah :

“MENUJU MASYARAKAT KOTA BATU PRODUKTIF DAN SEJAHTERA TAHUN 2012”

2) Misi

Untuk mewujudkan visi diatas maka selanjutnya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu menjabarkan visi tersebut dalam misi yang menjadi pedoman dalam melakukan aktivitas melalui pelaksanaan kebijakan dan kegiatan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi. Jadi, misi memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan atau upaya-upaya yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Adapun misi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu adalah sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan
- b. Menanggulangi pengangguran
- c. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu berpedoman pada peraturan walikota Batu no 6 tahun 2010 tentang pejabaran tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu.

a. Tugas Pokok

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu melaksanakan urusan, pemerintahan di bidang sosial dan ketenagakerjaan.

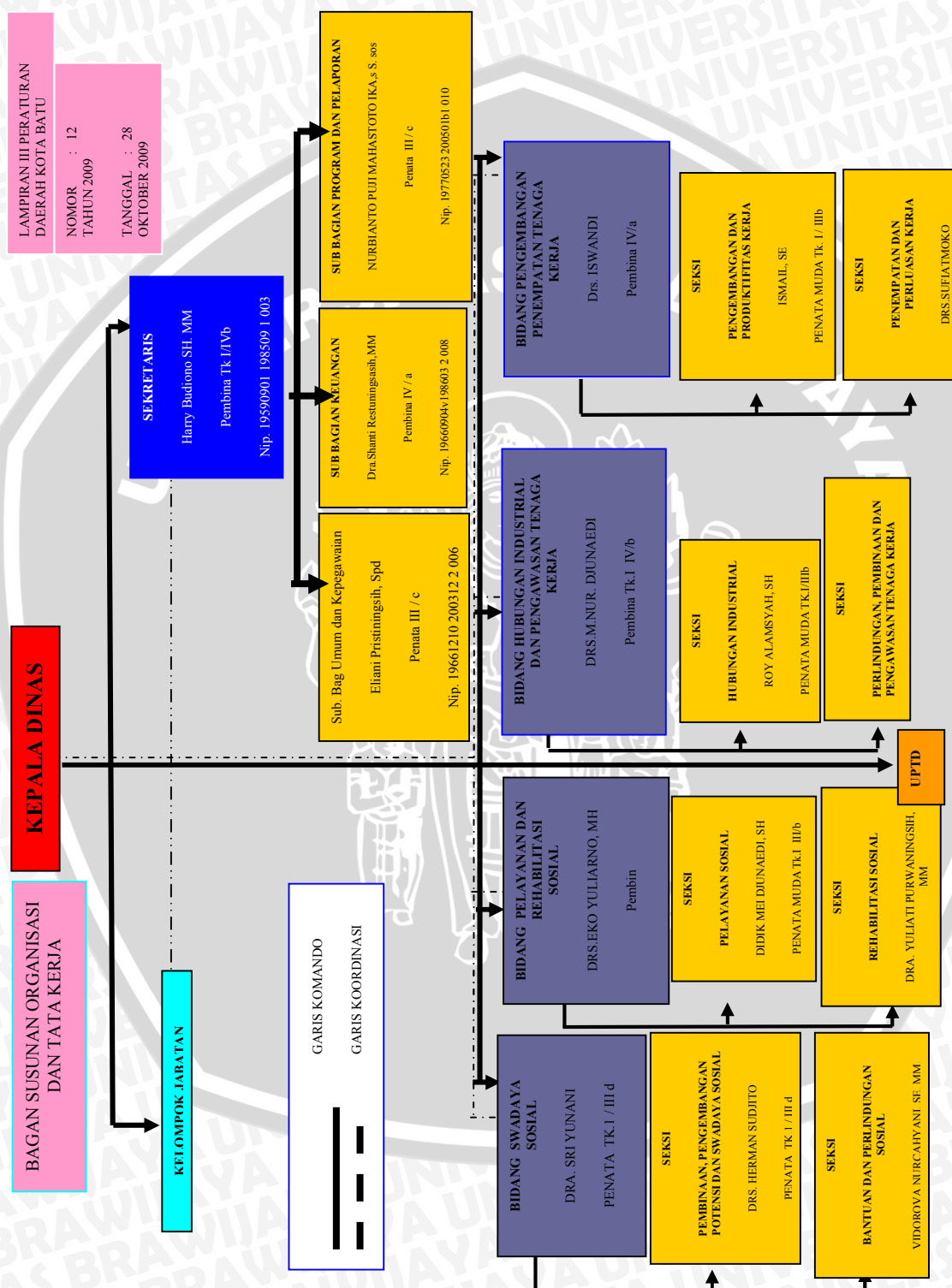
b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial dan ketenagakerjaan
- 2) Penyelenggaraan urusan sosial dan ketenagakerjaan serta pelayanan umum sesuai lingkup tugas
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sos-naker (sosial dan tenaga kerja)
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota. Sesuai tupoksi

c. Struktur Organisasi

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Batu dibentuk berdasarkan PERDA nomor 12 tahun 2009 tentang perubahan atas perda no.5 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah Kota Batu. Berikut ini adalah gambar struktur organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu, yaitu :

(Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu tahun 2012-2017)



B. Penyajian Data

1. Implementasi Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu.

Untuk mengetahui proses implementasi Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu, peneliti menganalisis dengan menggunakan Teori Implementasi Model George Edward III dimana model tersebut didalamnya mempunyai 4 (empat) variabel untuk mengukur sejauh mana implementasi kebijakan bisa dinilai optimal atau tidak, adalah:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan sebuah informasi agar nantinya Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu ini dapat berjalan dengan baik. Baik disini diartikan sebagai kelancaran, kejelasan, dan konsistensi menyampaikan atau pengiriman perintah dan arahan atau informasi kebijakan.

Dalam proses berjalannya implementasi Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu sudah pasti harus adanya komunikasi yang terjalin dengan baik, baik dengan semua struktural organisasi satu sama lain yang ada dalam instansi maupun dengan mitra kerja, jika komunikasi antar pegawai instansi dan mitra kerja tidak terjalin dengan baik maka akan ditemukan berbagai macam kesulitan untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Di dalam Program Kartu Pencari Kerja (AK-1), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu menjalin komunikasi dengan beberapa pihak, contohnya dengan pihak Disperindag, Koperasi, Unit Kegiatan Masyarakat (UKM). Dari kerjasama dengan beberapa pihak pemerintahan dan swasta tersebut. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu dapat dengan mudah untuk menyalurkan para pencari kerja ke bidang pekerjaan yang diinginkan dan memenuhi lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh pihak yang bekerjasama. Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari Ibu Rina Dwitasari selaku Staff Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu, sebagai berikut :

“Dari kegiatan Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) yang ada di Kota Batu, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait Kartu Pencari Kerja (AK-1) dan selama ini komunikasi yang terjalin dengan pihak-pihak terkait tersebut telah berjalan dengan baik dan optimal. Kami menjaga komunikasi tersebut agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahfahaman dalam proses melayani para pencari kerja karena setelah calon pencari kerja mendaftar dan kami berikan formulir kartu pencari kerja (AK-1) dengan memilih form biru untuk instansi swasta atau perusahaan dan form kuning untuk instansi pemerintahan, kemudian para pencari kerja kami serahkan ke pihak-pihak tersebut untuk di tindak lanjuti. Sebelum para pencari kerja kami serahkan kepada pihak-pihak tersebut kami juga memberikan penyuluhan dan pelatihan untuk para pencari kerja agar mempunyai bekal sebelum kita serahkan kepada pihak-pihak yang bekerjasama dengan kami.” (wawancara Hari Rabu tanggal 11 mei 2016, pukul 08.00 WIB di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu).

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa dalam aspek Komunikasi, Dinas sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu menjalin hubungan komunikasi dengan pihak-pihak yang bekerjasama dan juga menjalin hubungan dengan para pencari kerja dengan cara penyuluhan, juga pelatihan kepada calon para pencari kerja dalam proses Pelaksanaan Program Kartu Pencari Kerja di Kota Batu.

Berikut ini adalah pihak-pihak yang berkomunikasi dan bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu :

- 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota batu
- 2) Koperasi-Koperasi Kota Batu
- 3) Unit Kegiatan Masyarakat (UKM)
- 4) Jatim Park Group
- 5) Bpk Cahyono Group
- 6) Indomarko Prismatama
- 7) Koperasi Semarak Dana
- 8) MNC Group
- 9) FIF
- 10) Persatuan Hotel Republik Indonesia
- 11) Bina Avia Persada
- 12) PT. Sahabat Membangun Bersama
- 13) AKAPE Group

14) Puskesmas Prasetya Husada

15) Club Bunga

16) BIFAS

(Sumber Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu yang diolah)

b. Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan publik juga harus didukung oleh sumber daya seperti sumber daya manusia, sumber daya material, serta sumber daya sarana dan prasarana. Sasaran tujuan dan isi dari suatu implementasi kebijakan publik walaupun telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten kepada masyarakat atau para pencari kerja, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan suatu proses implementasi, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif dan efisien.

Sumber daya dalam implementasi kebijakan publik adalah faktor penting dalam proses implementasi kebijakan publik agar efektif dan efisien. Tanpa sumber daya sebuah kebijakan dinilai kurang optimal, karena kebijakan hanya untuk memberikan pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat bukan upaya untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Rina Dwitasari selaku Staff Sub Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu berikut ini:

“Sumber daya adalah faktor pendukung kebijakan yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan dan

pada suatu kegiatan, baik itu sumber daya manusia, maupun sumber daya sarana dan prasarana. Dikarenakan sematang dan sesiap apapun kita merencanakan suatu kebijakan tanpa didukung dengan adanya sumber daya yang memadai, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu memiliki sumber daya manusia yang baik namun karena juga dilihat dari segi efisiensi dalam bekerja melayani calon pencari kerja sumber daya manusianya masih kurang disini, karena hanya 4 orang yang bertugas dalam pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK-1), “saya saja masih sering kelabakan dalam melayani calon pencari kerja di karenakan saya juga tidak selalu stay di kantor terkadang saya harus tugas keluar kantor yang di tugaskan oleh pimpinan saya” yang menyebabkan tidak efisien waktu dalam pelayanan. Namun sumber daya sarana dan prasarana yang ada di sini sudah sangat mumpuni untuk melakukan proses pelayanan kepada calon pencari kerja.” (Wawancara hari Rabu 11 Mei 2016, pukul 09.00 WIB di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu).

Di dalam proses Implementasi Program Kartu Pencari Kerja (AK-1), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memiliki beberapa sumber daya antara lain:

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu dalam melaksanakan proses Kartu Pencari Kerja (AK-1) sebagai berikut:

- a) Berdasarkan tugasnya atau tupoksinya di dalam Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu bagian yang bertugas mengurus dan menindaklanjuti para pencari kerja (pencaker) juga mengatur tentang kartu pencari kerja (AK-1) adalah Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja yang di namakan

Petugas Antar Kerja. Adapun sumber daya manusia yang bertugas memproses Kartu Pencari Kerja (AK-1) berjumlah 4 (empat) orang yaitu:

No	Nama Petugas Kartu Pencari Kerja (AK-1)	Bertugas
(1)	Bu Umi	Melayani dan mengawasi bursa kerja online untuk calon para pencari kerja
(2)	Bu Rina	Melayani pembuatan kartu pencari kerja (AK-1) dan mendata pengarsipan pendaftar kartu pencari kerja kemudian juga sebagai pengabar bagi pendaftar kartu pencari kerja bahwa terdapat lowongan pekerjaan melalui via sms kepada pendaftar kartu pencari kerja
(3)	Pak Aziz	Melayani bursa kerja online dan memberikan penyuluhan pada calon pencari kerja
(4)	Pak Dani	Melayani pembuatan kartu pencari kerja (AK-1) dan memberikan informasi lowongan pekerjaan pada perusahaan dan instansi yang membuka lowongan pekerjaan

(Sumber Data primer yang diolah)

2) Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sumber daya sarana dan prasarana yang ada di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu antara lain :

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
A.	Sarana dan Prasarana Kartu Pencari Kerja			
1.	Fasilitas Internet	Unit	1	Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
2.	Komputer	Buah	3	Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
3.	Printer	Buah	3	Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
B.	Bursa Kerja Online			
1.	Komputer	Buah	2	Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

(Sumber Data primer yang diolah)

c. Disposisi

Dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan sangat membutuhkan dukungan dan sikap positif dari para pelaksana atau implementor, karena merekalah yang terjun dan berhubungan langsung

dengan kelompok sasaran. Sikap pelaksana atau implementor dalam menjalankan kebijakan serta tugas-tugas untuk mencapai tujuan sangat berpengaruh sekali dalam optimal atau tidak pelaksanaan dalam proses Implementasi Program Kartu Pencari Kerja (AK-1). Diterapkannya Kebijakan Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu memperoleh respon yang sangat baik dari para pelaksana atau implementornya di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Drs. Sufiatmoko selaku Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu sebagai berikut:

“ Dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan dilakukan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu selalu mengupayakan dan memfasilitasi agar kebijakan dan kegiatan tersebut dapat terlaksana secara maksimal dan optimal, karena itu sudah menjadi tugas dan kewajiban atau jobdisk kami dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu. Begitupun dalam proses pelaksanaan pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu. Untuk melaksanakan setiap kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu berupaya agar semua kegiatan berjalan dengan sangat maksimal sesuai dengan apa yang sudah menjadi target dari sisi sikap saya sebagai kepala staff seksi penempatan dan perluasan kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu sangat nyaman dan senang dalam memimpin staff saya karena teman-teman nyaman dan enjoy. Sejauh ini pengawasan dari saya semua staff menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan jobdisk masing-masing dan terlihat semangat dengan apa yang di kerjakan” (wawancara hari Rabu 11 Mei 2016, pukul 09.15 wib di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu).

Hal tersebut juga diterangkan oleh Ibu Rina Dwitasari selaku Staff Petugas Antar Kerja Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja berikut ini:

“Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu selalu berusaha menjalankan setiap kebijakan agar berjalan dengan maksimal dan baik. Dalam Program Kartu Pencari Kerja (AK-1), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu mengupayakan agar setiap kegiatan dapat terlaksana dan hasilnya sesuai dengan harapan. Kemudian pada sisi sikap dari para Petugas Antar Kerja sangat positif dengan menerima, dan enjoy karena sudah menjadi jobdisk kami pada pelayanan pembuatan kartu pencari kerja seperti saya sangat “enjoy” dan senang karena sudah menjadi pekerjaan saya keseharian begitu juga dengan teman teman saya yang bertugas saya melihat mereka juga bersemangat dan senang dalam melakukan pelayanan kartu pencari kerja pada kesehariannya” (wawancara hari Rabu 11 Mei 2016 pukul 10.15 wib di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Program Kartu Pencari Kerja di Kota Batu menyupayakan agar kebijakan berjalan dengan optimal sehingga dapat mendapatkan hasil sesuai harapan pemerintah Kota Batu. Berikut ini adalah data pencari kerja dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu pada tahun 2014 dan 2015 :

Tabel Pencari Kerja Terdaftar Perkecamatan Pada Tahun 2014

No	Bulan	Batu		Bumiaji		Junrejo	
		L	P	L	P	L	P
1	Januari	4	4	0	1	3	1
2	Februari	13	14	2	9	0	4
3	Maret	6	8	0	9	4	3
4	April	4	3	3	0	1	3
5	Mei	2	2	1	0	4	1
6	Juni	20	49	8	38	6	14
7	Juli	5	6	4	4	2	0
8	Agustus	7	6	5	4	9	2
9	September	36	87	47	43	18	63
10	Oktober	2	2	2	0	1	0
11	November	7	2	9	5	8	0
12	Desember	1	4	0	3	3	1
	Jumlah	107	187	81	116	59	92
	Jumlah Total	294		197		151	

(sumber:Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu)

Tabel Pencari Kerja Terdaftar Pada Tahun 2015

BULAN	PENCAKER		LOWONGAN		PENEMPATAN	
	L	P	L	P	L	P
Januari	7	14	10	10	3	1
Februari	7	14	56	39	5	7
Maret	24	10	45	55	4	8
April	37	29	66	41	16	9
Mei	29	104	24	23	8	11
Juni	20	36	71	64	17	34
Juli	13	24	24	34	6	9
Agustus	24	11	42	53	16	7
September	13	15	112	137	6	9
Oktober	16	9	8	2	13	5
November	4	5	8	15	4	3
Desember	1	9	0	4	1	3
Jumlah	195	280	466	477	99	106
Jumlah Total	475		943		205	

(sumber:Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu)

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi disini merupakan keterkaitannya dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi fasilitator atau yang berwenang dalam proses implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi yang dimaksud disini adalah bagaimana pembagian wewenang di dalam sebuah organisasi yang tujuan agar tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan di dalam organisasi.

Diperkuat dengan penjelasan dari bapak Drs. Sufiatmoko, Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu. Sebagai berikut :

“Struktur birokrasi sangat penting dalam proses implementasi kebijakan, agar proses implementasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, maka dibutuhkan struktur birokrasi yang jelas agar tidak adanya tumpang tindih dan kekeliruan soal kewenangan dan struktur birokrasi. Jadi untuk itu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu khususnya seksi penempatan dan perluasan kerja, memiliki struktur organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengurus tentang pelayanan pembuatan Kartu Pencari Kerja, juga memfasilitasi para pencari kerja. Tetapi untuk Rencana Kerja (Renja) dan Rencana strategi (Renstra) dalam kebijakan program Kartu Pencari Kerja (AK-1) untuk sementara belum ada dikarenakan Kartu Pencari Kerja (AK-1) sebuah Tupoksi (jobdisk) dari Pemerintah Kota Batu dan belum di bukukan. Sehingga dapat dikatakan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu sudah baik namun belum sepenuhnya optimal karena masih ada beberapa permasalahan peraturan atau penguat kebijakan yaitu SOP.” (wawancara hari Rabu 11 Mei 2016 pukul 11.00 wib, di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga kerja kota Batu)

Menurut hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pemrosesan Implementasi Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu belum mengatur struktur birokrasinya di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini sedikit menyulitkan dalam proses Implementasi Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu dikarenakan belum adanya acuan kejelasan tugas dan wewenang dari masing-masing bidang sesuai dengan fungsinya, kemudian belum adanya rencana strategi (Renstra) dan rencana kerja (Renja).

Aspek lainnya adalah fragmentasi organisasi dalam melaksanakan kebijakan. Dalam pelaksanaan Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu merupakan sebagai koodinator dan penanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan khususnya menangani kartu pencari kerja (AK-1). Sehingga akan dengan mudah dalam menjalankan proses kebijakan tersebut karena memiliki tugas pokok dan fungsi utama terkait dengan Implementasi Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu. Berikut ini merupakan data kegiatan serta bidang yang menangani kartu pencari kerja (AK-1) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu:

Tabel Data Kegiatan Bidang Pengembangan Penempatan Tenaga Kerja, Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu

No	Kebijakan	Kegiatan	Bidang yang menangani
1	Program Kartu Pencari Kerja, Kartu kuning atau AK-1	1. Melayani dan memberikan pelatihan kepada pencari kerja sebelum di salurkan kepada perusahaan swasta atau instansi yang bekerja sama dengan Dinas 2. Pengelolaan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja 3. Pengendalian pendaftaran dan seleksi calon tenaga kerja Indonesia serta pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) 4. Pengawasan rekrutmen dan seleksi serta pengesahan pengantar 5. Pengawasan rekrutmen dan seleksi serta pengesahan pengantar kerja dan penempatan tenaga kerja AKAD/ Antar Kerja Lokal (AKL)	Bidang Pengembangan Penempatan Tenaga Kerja, Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja

Sumber : Data Primer dan Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kota Batu

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program Kartu

Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu

a. Faktor Pendukung

1) Kebijakan Pemerintah atau Landasan Hukum

Dalam melaksanakan suatu proses kebijakan harus memiliki landasan hukum untuk lebih menguatkan kebijakan itu sendiri. Dengan adanya landasan hukum yang jelas maka dapat dijadikan sebuah pedoman dalam melakukan proses implementasi kebijakan. Penegakan hukum akan sangat berguna demi kepatuhan dan pengawasan dalam melakukan proses pengimplementasiannya. Yang artinya, sebuah landasan hukum yang sangat jelas dan tegas akan membuat pelaksana kebijakan patuh dan menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan hukum dan bisa menjadi sebuah alat kontrol bagi masyarakat apakah para pelaku kebijakan menjalankan kebijakan dengan baik dan benar. Hal tersebut diperkuat juga dengan pernyataan dari Bapak Drs. sufiatmoko selaku kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu, sebagai berikut :

“Dalam melaksanakan suatu proses kebijakan haruslah mempunyai landasan hukum yang jelas dan kuat. Dalam pelaksanaannya Implementasi Program Kartu Pencari Kerja di Kota Batu, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu memiliki beberapa landasan hukum antara lain Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan juga Peraturan Menteri (PERMEN) nomor PER.07/MEN/IV/2008 tentang penempatan tenaga kerja. Landasan-landasan hukum diatas yang digunakan sebagai pedoman oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu dalam pelaksanaan Kartu Pencari

Kerja (AK-1) di Kota Batu.” (Wawancara hari Rabu 11 Mei 2016 pukul 11.25 wib, di kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu)

2) Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sumber daya merupakan aspek yang sangat penting dalam menjalankan sebuah implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu terdapat sumber daya pendukung pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu, yaitu sumber daya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai akan sangat mendukung optimalnya proses berjalannya implementasi. Maka sumber daya yang mendukung tersebut diharapkan dapat menunjang dari Implementasi Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu sehingga berjalan sesuai target. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Drs. Sufiatmoko selaku kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu, yaitu sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu didukung dengan sumber daya yang cukup memadai, yaitu sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu. Adapun sarana dan prasarana pendukung proses berjalannya implementasi kebijakan yang dimiliki Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu meliputi fasilitas internet, komputer, dan printer. Tentunya sarana dan prasarana tersebut sangat membantu demi tercapainya tujuan dari implementasi kebijakan yang dilaksanakan dan pelayanan kepada masyarakat atau pencari kerja terpenuhi dengan baik.”

(wawancara hari Rabu 11 Mei 2016 pukul 11.20 wib di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu).

b. Faktor Penghambat

1) Ketidaklengkapan Persyaratan yang dimiliki Calon Pencari Kerja (Pencaker)

Dalam proses implelementasi kebijakan Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu dari sisi para pencari kerja (Pencaker) juga bisa menjadi salah satu faktor penghambat karena para pencari kerja biasanya tidak membawa dan tidak bisa melengkapi persyaratan yang telah di tentukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu untuk mengurus kartu pencari kerja. Sehingga menyebabkan pemprosesan pembuatan kartu pencari kerja (AK-1) tersebut akan memakan waktu lama dan para petugas yang mengurus pembuatan kartu pencari kerja harus menunggu persyaratan dari calon pencari kerja melengkapi persyaratan yang telah di tentukan. Seperti yang di jelaskan oleh Ibu Rina Dwitasari selaku petugas antar kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu, sebagai berikut :

“Dalam proses pembuatan kartu pencari kerja (AK-1) salah satu faktor penghambat pemprosesan pembuatan kartu pencari kerja yaitu adalah dari sisi calon pencari kerja itu sendiri karena pada saat mendaftarkan diri calon pencari kerja tidak membawa dan tidak dapat melengkapi persyaratan yang telah di tentukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu untuk memperoleh kartu pencari kerja seperti tidak membawa ijazah dikarenakan ijazah dari calon pencari kerja belum keluar dan hanya membawa surat kelulusan (SKL) kemudian belum terjaringnya kepada masyarakat yang sudah menempuh S-1 karena di Kota

Batu masih belum mempunyai universitas sehingga kami belum bisa menjangkau secara keseluruhan penduduk di Kota Batu yang berpendidikan perguruan tinggi sementara hanya lulusan dari SMA atau SMK.” (wawancara pada hari Rabu 11 Mei 2016 pukul 13.00 wib di kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu).

2) Kurangnya Sosialisasi Kartu Pencari Kerja Kepada Masyarakat dan Instansi

Faktor penghambat yang lain dalam proses pelaksanaan Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu adalah kurangnya sosialisasi kartu pencari kerja kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu, masyarakat kurang mengetahui dan memahami tentang adanya kartu pencari kerja dan apa fungsi dan kelebihan dari memiliki kartu pencari kerja tersebut. Hal ini diperjelas oleh Bapak Drs. Sufiatmoko selaku Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu berikut ini:

”Kurangnya sosialisasi mengenai kartu pencari kerja kepada masyarakat di Kota Batu juga merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu. Sehingga masyarakat yang belum memiliki pekerjaan atau ingin memperoleh pekerjaan yang sesuai keinginannya tidak begitu memahami dan bingung akan melangkah karena tidak mengetahui tentang bagaimana kartu pencari kerja itu berfungsi dan kelebihan memiliki kartu pencari kerja. Hal ini disebabkan kurangnya kegiatan-kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja Kota Batu serta sikap dari masyarakat Kota Batu itu sendiri yang kurang mendukung dan bersikap acuh tidak jempot bola terhadap adanya kartu pencari kerja ini.” (wawancara pada hari Rabu 11 Mei 2016 pukul 13.30 wib di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota batu).

C. Analisis Data

1. Implementasi Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu

Implementasi Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu belum berjalan cukup baik. Dalam menjalankan proses Implementasi Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu memiliki landasan hukum yang jelas dan kebijakan dari pemerintah sebagai pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat. Seperti undang-undang nomer 13 tahun 2003 juga peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomer 7 tahun 2008.

Namun dari landasan hukum yang jelas tersebut Kartu Pencari Kerja di Kota Batu masih belum mempunyai rencana strategi (RENSTRA) yang jelas dan belum di rancang rencana strateginya karena sebagai tupoksi yaitu tugas (Jobdisk) pokok dari Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kota Batu dan belum di bukukan untuk melayani dan fasilitas untuk masyarakat. Sehingga menyulitkan bagi para pelaksana kebijakan untuk menjalankan kebijakan tersebut.

a. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2009:104) informasi perlu sekali disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami

apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan dan target kebijakan itu sendiri.

Terdapat tiga (3) indikator yang digunakan sebagai tolak ukur dari keberhasilan dan optimalnya variabel komunikasi tersebut, yaitu:

- 1) Transmisi, merupakan penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula. Sering kali hal yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah salah pengertian antara pelaku dan penerima kebijakan. Hal ini dikarenakan komunikasi melalui tingkatan birokrasi.
- 2) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaku kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan para pelaku kebijakan.
- 3) Konsistensi, perintah yang diberikan haruslah konsisten dan juga jelas, sehingga tidak menimbulkan kebingungan antara pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Hasil dari analisis dan wawancara dengan Ibu Rina Dwitasari selaku Staff Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu dan mengacu pada ketiga variabel komunikasi, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu sudah mampu melaksanakan dengan baik dalam proses

implementasi Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu. Dari segi transmisi, komunikasi mulai terjadi dengan disahkannya peraturan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial yaitu Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan demikian pemerintah mengintruksikan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu selaku pelaksana teknis di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan ini. Koordinasi yang berjalan dengan baik juga memerlukan komunikasi yang baik pula, terutama agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman atau tumpang tindih dalam pelaksanaan proses kebijakan. Dalam komunikasi pelaksanaan Kebijakan Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu telah menetapkan beberapa kegiatan sosialisasi untuk para pencari kerja yang mendaftar kartu pencari kerja dan menetapkan seksi penempatan dan perluasan kerja yang bertugas menjalankan kegiatan tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut nantinya tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

Dalam tabel penjelasan tentang kegiatan dan bidang yang menangani kegiatan dalam hasil penelitian terlihat secara jelas bahwa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu mempunyai peran penting dalam pelaksanaan Implementasi Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu ini, dan sejauh ini komunikasi berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pula dari komunikasi yang dilakukan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu dengan mengajak

pihak-pihak terkait yaitu perusahaan yang bekerja sama dengan dinas untuk memberikan info bila membutuhkan tenaga pekerja dan menerima para pencari kerja yang mendaftar pada dinas dalam melancarkan pelaksanaan kebijakan tersebut seperti pada daftar kerjasama Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu.

Adanya Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu ini, juga sangat perlu di komunikasikan ke seluruh pihak terkait agar mereka mengetahui dan faham akan tujuan dari ditetapkannya kebijakan ini. Hal tersebut sudah dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu selaku pelaksana dan penanggung jawab kebijakan. Namun, terlihat masih kurang optimal kinerjanya dikarenakan masih banyak perusahaan atau instansi dan juga masyarakat di Kota Batu yang belum terjangkau dan mengetahui tentang adanya Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) ini.

b. Sumber Daya

Aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik berikutnya yaitu ketersediaan sumber daya (*Resources*). Sumber daya Menurut Edward III dalam Widodo (2009:104) bahwa sejelas dan konsistennya apapun ketentuan-ketentuan dan aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan tersebut, proses implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya kurang memiliki sumber daya untuk melaksanakan kebijakan atau tugas secara efektif. Banyak sedikitnya jumlah sumber daya

manusia tidak menjadi jaminan bahwa kebijakan akan berjalan dengan cepat dan tepat, akan tetapi sumber daya yang memiliki kualitas yang baiklah yang dapat memperlancar berlangsungnya proses suatu kebijakan. Sehingga perlu adanya manajemen sumber daya manusia yang baik dan benar agar dapat meningkatkan kinerja kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan data analisis data dan wawancara yang diperoleh penulis dengan mewawancarai Ibu Rina Dwitasari selaku Staff Sub Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu, menunjukkan bahwa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu memiliki sumber daya manusia yang sangat kurang memadai. Data jumlah pegawai yang ada di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu, khususnya pada Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja selaku yang mengurus tentang Kartu Pencari Kerja terdapat 4 (empat) orang personil yang bertugas terbagi dalam 2 bagian tugas yaitu bagian Kartu Pencari Kerja (AK-1) dan bagian bursa Kerja online dimana bagian-bagian tersebut memiliki tugas dan kegiatan masing-masing dalam proses pelaksanaan kebijakan ini. Secara keseluruhan sumber daya manusia yang ada di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu apabila dilihat dari faktor kualitas tidaklah kurang. Akan tetapi jika ditinjau dari segi kuantitas, jumlah petugas dari Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja yang hanya berjumlah 4 (empat) orang dinilai sangat kurang karena akan mempengaruhi proses pengerjaan pelayanan kartu pencari kerja dan bisa menjadi penghambat waktu untuk memproses kartu pencari

kerja (AK-1) menjadi memakan waktu yang lama sehingga menjadikan kegiatan pembekalan bagi pencari kerja sebelum di berikan kepada instansi atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja menjadi kurang maksimal dalam memberikan sosialisasi dan pembinaan karena kurangnya sumber daya manusia yang melayani pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu, serta pengawasan untuk terjaringnya masyarakat Kota Batu menjadi kurang optimal hasilnya.

Terkait dengan fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Kebijakan Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu ini, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu memiliki fasilitas serta sarana dan prasarana yang cukup memadai jika dilihat hasil penelitian pada tabel inventaris barang yang dimiliki oleh Seksi Penempatan dan Perluasan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu. Namun, masih ada aspek yang belum terpenuhi yaitu aspek sumber daya anggaran pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu karena tidak adanya Rencana Strategis (RENSTRA) atau belum terbentuknya Rencana Strerategi tersebut menjadikan Kartu Pencari Kerja (AK-1) tidak berjalan dengan baik pada prosesnya seperti kurang jelasnya sosialisasi berjalan kemana, kurang terstrukturnya kegiatan yang mendukung kartu pencari kerja (AK-1), bahkan kurang fahamnya masyarakat dan instansi yang ada di Kota Batu tentang fungsi dan manfaat adanya Kartu Pencari Kerja (AK-1). Tidak adanya sistem jemput bola dari dinas untuk menjaring calon pencari kerja di karenakan terbatas pada tidak adanya rencana strategi yang jelas.

Dari aspek sumber daya ini, kesimpulan yang diperoleh juga dari hasil penelitian yang di analisis pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu dapat dilihat bahwa dalam menjalankan proses Implementasi Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu telah memiliki sumber daya yang sudah berjalan dengan baik tetapi dari sumber daya manusia masih kurang untuk menimbulkan pelayanan yang berkualitas, dan dilihat dari segi fasilitas sudah sangat memadai. Juga masih ada kekurangan yang lain pada indikator sumber daya ini jika menurut Edward III dalam Widodo (2009:104) yaitu tidak adanya sumber daya anggaran dikarenakan belum adanya Rencana Strategi (Renstra) yang jelas pada implementasi kebijakan tersebut. Namun dinilai sudah sangat membantu dan sudah berjalan pada indikator ini dalam proses berjalannya implementasi kebijakan tersebut namun terlihat kurang maksimal karena belum adanya rencana strategi sehingga menyebabkan strategi-strategi yang baik dan inovatif kurang terlihat pada aspek ini sangat sulit terlihat monoton.

c. Disposisi

Aspek berikutnya adalah disposisi atau sikap para pelaksana. Aspek ini merupakan faktor penting dalam pendekatan implementasi kebijakan. jika pelaksanaan kebijakan ingin bekerja secara efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya harus memahami apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk melaksanakannya. Apabila para pelaksana

kebijakan bersikap mendukung terhadap suatu kebijakan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila sikap atau prespektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan akan semakin sulit. Pejabat birokrasi pemerintah merupakan pelaksana-pelaksana yang paling penting dalam mengetahui pengaruh-pengaruh tertentu pada sikap para pelaksana. Sikap atau disposisi dari pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan terhadap proses berjalannya implementasi kebijakan jika para pelaksana ada yang tidak bisa melakukan kebijakan dengan baik. Untuk mengatasi persoalan ini, pemilihan dan pengangkatan para pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi yang tinggi kepada kebijakan yang telah ditetapkan. Pegawai yang diangkat dan diberikan wewenang dalam pelaksanaan implementasi kebijakan haruslah mempunyai kemampuan dan juga mengetahui apa yang harus dilakukan. Dinas pemerintah mempunyai beberapa karakteristik yang mungkin tidak dimiliki oleh dinas lainnya begitu pula dengan penetapan pegawai pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Batu merupakan tindak lanjut dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu yang bertugas mengatur pegawai dan sejauh ini berjalan dengan baik.

Jika dilihat dari hasil analisis data dan wawancara kepada bapak Sufiatmoko dan ibu Rina yang dianalisis pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu. Masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian dan kekurangan antara

latar belakang pendidikan dengan penempatan bidang kerjanya, sehingga pegawai tersebut mau tidak mau harus beradaptasi dengan tugas yang bukan keahliannya. Hal ini sangat berpengaruh pada proses berjalannya Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu. Hal tersebut dapat dilihat dan disimpulkan dari tabel pencari kerja terdaftar pada tahun 2015 yang jumlah total pencari kerja di kota batu tercatat 475 orang, lowongan pekerjaan yang ada total 943 lowongan pekerjaan, dan total penempatan tenaga kerja 205 orang.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa pegimplementasian kartu pencari kerja di Kota Batu ini belum berjalan secara maksimal dan optimal. Akan tetapi dalam melakukan sebuah proses menjalankan pelayanan pembuatan kartu pencari kerja (AK-1) ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu memiliki landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan organisasinya yang bertanggung jawab mengurus tentang kartu pencari kerja. Pedoman tersebut yaitu Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan juga landasan Peraturan Menteri (PERMEN) nomor PER.07/MEN/IV/2008 tentang penempatan tenaga kerja. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kesiapan pemerintah Kota Batu dalam melakukan penyelenggaraan ketenagakerjaan khususnya pembuatan kartu pencari kerja (AK-1). Produk hukum inilah yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu kebijakan. Adanya produk hukum tersebut harus di implemantasikan dengan baik oleh aktor-aktor yang harus ahli di bidangnya.

Kecenderungan pelaksanaan Implementasi Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu sangat mendukung dengan aparaturnya yang menunjukkan sikap senang atau enjoy dan sangat berkemauan dalam melakukan tugas dan sudah menjadi bagian dari tupoksi pada Seksi Perluasan dan Penempatan Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu untuk mengurus dan bertanggung jawab tentang Kartu Pencari Kerja (Ak-1).

d. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2009:104) Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan berpengaruh terhadap kecenderungan melemahnya pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang sangat rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel atau kaku dalam prosesnya.

Hasil analisis wawancara dengan bapak Sufiatmoko dan mengacu pada penjelasan diatas, menunjukkan bahwa implementasi Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu ini telah dirumuskan indikator-indikator keberhasilannya secara tegas dan terukur. Hal ini memudahkan dalam penentuan keberhasilan optimalisasi dari suatu kebijakan kegiatan. Dalam Implementasi Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu mengacu pada masing-masing bidang yang dimiliki. Pada tabel data wawancara kegiatan bidang pengembangan dan penempatan kerja, seksi penempatan dan perluasan tenaga kerja Kota Batu tergambarkan bahwa wewenang yang dimiliki bagian-bagian dalam Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu sudah sesuai dengan tugasnya. Sehingga dalam melakukan kebijakan dapat mengacu pada kegiatan tersebut.

Aspek lain pada struktur birokrasi adalah fragmentasi organisasi dalam melaksanakan kebijakan. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi, seringkali juga terjadi desentralisasi kekuasaan dalam aspek tersebut yang dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan kebijakan. Dalam analisis wawancara dalam pelaksanaan Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu ini, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu merupakan koodinator pelaksaaan proses Implementasi Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu yang memang bertugas menaungi pelaksanaan teknis di bidang Ketenagakerjaan, sehingga akan lebih mudah dalam menjalankan kebijakan tersebut karena memiliki tugas pokok dan fungsi utama terkait

Implementasi Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu dan hasilnya dilakukan dengan optimal karena sudah terstruktur namun dari hasil wawancara juga masih ada kekurangan dari indikator ini yaitu masih belum adanya Rencana Kerja (Renja) dan belum di bukukannya Rencana Strategi (Renstra) sehingga masih monotonnya strategi sehingga belum terlihat maksimal optimalisasinya hasil dalam berlangsungnya proses pegimplementasian Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu menjadikan kartu pencari kerja menjadi sebuah senjata yang tumpul karena kurangnya peminatan dari segi masyarakat dan belum secara keseluruhan mengetahui apa fungsi dan manfaatnya memiliki Kartu pencari kerja. Dari segi instansi dan perusahaan masih belum terjaringnya semua kerjasama dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Batu.

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dari Implementasi Program Kartu Pencari Kerja Di Kota Batu

a. Faktor Pendukung

1) Landasan Hukum

Dari hasil wawancara yang dianalisis Salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan Implementasi Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu karena didukung dari beberapa hal seperti adanya dasar hukum yang jelas, antara lain Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan Peraturan Menteri (PERMEN) Nomer PER.07/MEN/IV/2008 tentang penempatan tenaga kerja. Sehingga memudahkan pelaksana kartu pencari

kerja yang dalam hal ini merupakan tugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu dalam proses mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tujuan dari Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu tercantum dengan jelas di dalam Peraturan Menteri Nomer PER.07/MEN/IV/2008 tentang penempatan tenaga kerja pada Pasal 25 yang menuliskan bahwa :

- (1) Pencari kerja yang akan bekerja di dalam atau di luar negeri wajib dilayani oleh pengantar kerja di instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
- (2) Pencari kerja yang dilayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan memperlihatkan :
 - a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
 - b. copy ijazah pendidikan terakhir bagi yang memiliki;
 - c. copy sertifikat keterampilan bagi yang memiliki; dan
 - d. copy surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.
- (3) Pencari kerja yang telah memperoleh pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I).
- (4) Pengantar kerja wajib melakukan pengisian data pencari kerja (AK/II) melalui wawancara langsung untuk mengetahui bakat, minat, dan kemampuannya.

(5) Kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku selama 2 (dua) tahun dengan keharusan melapor selambat lambatnya 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal pendaftaran bagi pencari kerja yang belum mendapat pekerjaan.

(6) Pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang telah mendapatkan pekerjaan wajib melaporkan bahwa yang bersangkutan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Dengan diperkuat dengan Peraturan Menteri tersebut maka dalam proses pelaksanaan Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri tersebut atau sebagai acuan peraturan yang mendukung adanya Kartu pencari Kerja (AK-1).

2) Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Hasil dari analisis dan wawancara pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu dapat dianalisis bahwa dengan adanya sumber daya sarana dan prasarana pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu, selaku pelaksana teknis di bidang ketenagakerjaan. Sumber daya sarana dan prasarana ini merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi proses berjalannya kebijakan Implemenasi Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu. Sejauh ini menurut wawancara sumber daya sarana dan prasana yang ada di

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Batu sudah terpenuhi untuk proses pelayanan kartu pencari kerja dan juga di operasikan dengan semestinya oleh para aparatur yang bertugas. Sumber daya sarana dan prasarana ini menjadikan lebih terprogram dan terorganisir dalam melayani dan membantu para pencari kerja dalam memproses kartu pencari kerja (AK-1).

b. Faktor Penghambat

1) Ketidaklengkapan Persyaratan Calon Pencari Kerja (Pencaker)

Dari wawancara yang dianalisis oleh peneliti calon pencari kerja sendiri menjadi salah satu faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu. Di dalam Implementasi Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu, calon pencari kerja memiliki peran dan tujuan yang sangat penting dalam program kartu pencari kerja. Namun masih banyak calon pencari kerja yang menghambat proses pelaksanaan kartu pencari kerja di karenakan kurang mengetahui apa fungsi dan kelebihan memiliki kartu pencari kerja. Dan sebagian dari pencari kerja masih tidak bisa memenuhi persyaratan yang telah di tentukan untuk pembuatan kartu pencari kerja karena kurangnya sosialisasi tentang kartu pencari kerja juga bisa calon pencari kerja tidak memiliki salah satu dari persyaratan yang telah di tentukan contohnya seperti calon pencari kerja tidak memiliki ijazah juga tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP).

2) Kurangnya Sosialisasi Kartu Pencari Kerja Kepada Masyarakat dan Instansi

Analisis dari hasil penelitian pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu faktor penghambat berikutnya di dalam pelaksanaan Program Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Kota Batu adalah kurangnya sosialisasi tentang kartu pencari kerja (AK-1) kepada masyarakat dan instansi yang terkait. Sehingga baik masyarakat ataupun instansi kurang mengetahui dan memahami tentang bagaimana sistem pengurusan kartu pencari kerja, dan kurang mengetahui fungsi dan kelebihan memiliki kartu pencari kerja (AK-1). Dan juga belum terjangungnya masyarakat yang berpendidikan perguruan tinggi seperti S-1 karena masih belum ada universitas atau perguruan tinggi yang ada di Kota Batu sehingga masih terjangung masyarakat dan penduduk yang mengetahui dan berminat terhadap kartu pencari kerja.

Hal tersebut dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor antara lain faktor internal dan eksternal, dari faktor internal sendiri, belum optimalnya kegiatan sosialisasi yang dimiliki Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu. Sedangkan dari faktor eksternal, masyarakat sendiri masih cenderung bersikap acuh terhadap adanya kartu pencari kerja dan dari segi lembaga terkadang tidak mementingkan adanya kartu pencari kerja dalam salah satu pemrosesan pencarian pekerjaanya karena tidak mengetahui bagaimana kartu pencari kerja

kecuali perusahaan atau lembaga yang sudah bekerja sama dengan Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu.

